



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MUKHLISUDDIN
2. Jabatan : KEPALA BIRO ADMINISTRASI AKADEMIK, KEMAHASISWAAN DAN KERJA
SAMA
3. NHK : 211918

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.728.240.000

1. Tanah Seluas 6.986 m2 di KAB / KOTA BENGKULU TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 384.240.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 339 m2/339 m2 di NEGARA [unknown], Rp. 463.000.000
3. Tanah Seluas 20.000 m2 di NEGARA [unknown], HASIL SENDIRI Rp. 230.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 336 m2/112 m2 di NEGARA [unknown], HASIL SENDIRI Rp. 342.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 108 m2/4 m2 di NEGARA [unknown], HASIL SENDIRI Rp. 309.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 401.300.000

1. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 1.300.000
2. MOBIL, TOYOTA FORTUNER JEEP Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 160.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 8.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----



Sub Total	Rp.	2.297.540.000
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.297.540.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.